

BAB III
GAMBARAN UMUM
DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

3.1. Direktorat Jenderal Pembinaan Sekolah Menengah Pertama dari Segi Legalitas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005

Dasar hukum yang melandasi Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama sebagai Direktorat dibawah Departemen Pendidikan Nasional yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005. Didalam pasal 45 menyebutkan bahwa Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas melaksanakan bahan perumusan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, supervisi dan evaluasi di bidang pembinaan sekolah menengah pertama.

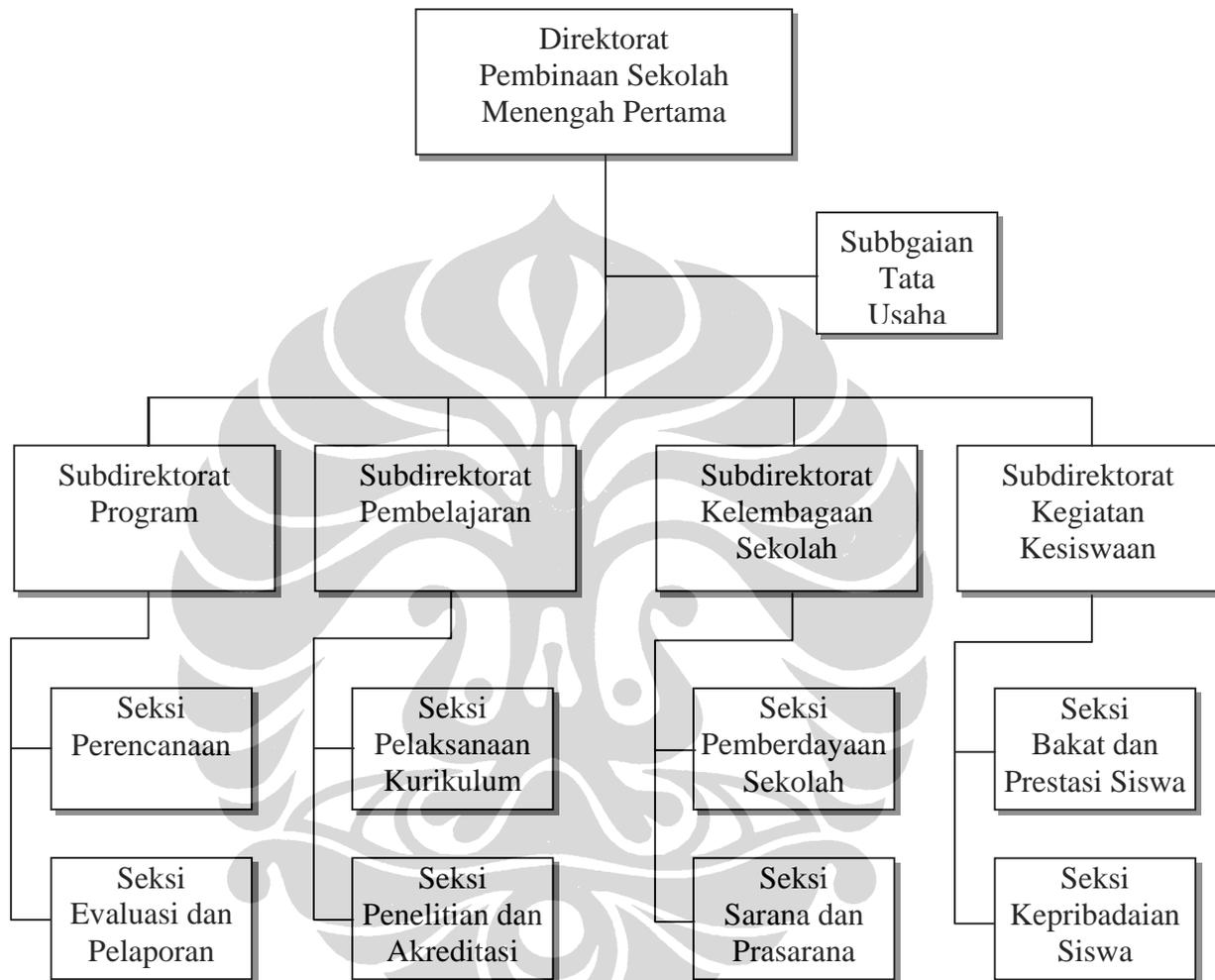
Dalam melaksanakan tugas Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pembinaan sekolah menengah pertama;
- b. Penyiapan rumusan standar, kriteria, pedoman dan prosedur dibidang pembinaan sekolah menengah pertama;
- c. Pemberian bimbingan teknis, supervisi dan evaluasi di bidang pembinaan sekolah menengah pertama;
- d. Pelaksanaan urusan ketata usahaan Direktorat

3.2. Struktur Organisasi Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama

BAGAN ORGANISASI

DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA



Gambar 3.1. Struktur Organisasi Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama
Sumber : Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 14 Tahun 2005

Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama terdiri atas :

a. Subdirektorat Program

Subdirektorat program mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan data dan informasi, penyusunan program, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program

Direktorat serta penyiapan bahan kerja sama di bidang pembinaan sekolah menengah pertama.

Dalam melaksanakan tugas subdirektorat program menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan data dan informasi pembinaan sekolah menengah pertama
2. Penyusunan program dan kegiatan Direktorat
3. Penyiapan bahan kerja sama dan pemberdayaan peran serta masyarakat di bidang pembinaan sekolah menengah pertama
4. Penyiapan bahan evaluasi dan laporan Direktorat

Subdirektorat Program terdiri dari :

a. Seksi perencanaan

Seksi perencanaan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan analisis data, penyajian informasi pembinaan sekolah menengah pertama, serta penyusunan program dan kegiatan direktorat.

b. Seksi Evaluasi dan Pelaporan

Seksi evaluasi dan pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, kerja sama dan pemberdayaan peranserta masyarakat di bidang pembinaan sekolah menengah pertama serta penyusunan laporan direktorat.

c. Subdirektorat Pembelajaran

Subdirektorat Pembelajaran memiliki tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, supervisi dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran.

Dalam melaksanakan tugas Subdirektorat Pembelajaran menyelenggarakan fungsi :

- a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pelaksanaan pembelajaran
- b) Penyiapan bahan perumusan standar, kriteria, pedoman dan prosedur di bidang pelaksanaan pembelajaran
- c) Pemberian bimbingan teknis, supervisi dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran

Subdirektorat Pembelajaran terdiri dari

- a) Seksi Pelaksanaan Kurikulum

Seksi Pelaksanaan Kurikulum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebijakan, standar, kriteria dan pedoman serta pemberian bimbingan teknis, supervisi dan evaluasi pelaksanaan kurikulum.

- b) Seksi Penilaian dan Akreditasi

Seksi penilaian dan akreditasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebijakan, standar, kriteria dan pedoman serta pemberian bimbingan teknis supervisi dan evaluasi pelaksanaan penilaian dan akreditasi.

- d. Subdirektorat Kelembagaan Sekolah

Subdirektorat Kelembagaan Sekolah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, supervisi dan evaluasi kelembagaan, pemberdayaan sekolah dan sarana prasarana.

Dalam melaksanakan tugas Subdirektorat Kelembagaan Sekolah

Menyelenggarakan fungsi :

- a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kelembagaan, pemberdayaan dan sarana prasarana sekolah menengah pertama.

- b) Penyiapan bahan perumusan standar, kriteria, pedoman dan prosedur di bidang kelembagaan, pemberdayaan dan sarana prasarana sekolah menengah pertama
- c) Pemberian bimbingan teknis, supervisi dan evaluasi di bidang kelembagaan, pemberdayaan dan sarana prasarana sekolah menengah pertama.

Subdirektorat Kelembagaan Sekolah terdiri dari

- a) Seksi Pemberdayaan Sekolah

Seksi Pemberdayaan sekolah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebijakan, standar, kriteria dan pedoman serta pemberian bimbingan teknis, supervisi dan evaluasi pemberdayaan sekolah menengah pertama.

- b) Seksi Sarana dan Prasana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebijakan, standar, kriteria dan pedoman serta pemberian bimbingan teknis, supervisi dan evaluasi sarana dan prasarana sekolah menengah pertama

- e. Subdirektorat Kegiatan Kesiswaan

Subdirektorat Kegiatan Kesiswaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, supervisi dan evaluasi kegiatan kesiswaan.

Dalam melaksanakan tugas subdirektorat Kegiatan Kesiswaan menyelenggarakan fungsi :

- a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kegiatan kesiswaan
- b) Penyiapan bahan perumusan standar, kriteria, pedoman dan prosedur kegiatan kesiswaan
- c) Pemberian bimbingan teknis, supervisi dan evaluasi di bidang kegiatan kesiswaan

Subdirektorat Kegiatan Kesiswaan terdiri atas :

- a) Seksi Bakat dan Prestasi Siswa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebijakan, standar, kriteria dan pedoman serta pemberian bimbingan teknis, supervisi dan evaluasi pembinaan bakat dan pengembangan prestasi siswa.
- b) Seksi Kepribadian Siswa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebijakan, standar, kriteria dan pedoman serta pemberian bimbingan teknis, supervisi dan evaluasi pembinaan kepribadian siswa.
- f. Subbagian Tata Usaha
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, perlengkapan dan kerumahtanggan Direktorat.

3.3. Visi dan Misi Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama

3.3.1. Visi Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama

Visi Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama yaitu :

Terwujudnya kesempatan dan pemerataan bagi semua warga negara Indonesia terhadap pelayanan pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang bermutu, akuntabel, efektif, efisien, dan mandiri dengan memberdayakan peran serta orang tua murid dan masyarakat dalam kerangka desentralisasi pendidikan.

3.3.2. Misi Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama :

- a. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia.

- b. Membantu dan memfasilitasi pengembangan seluruh potensi siswa Sekolah Menengah Pertama secara utuh dalam rangka mewujudkan generasi muda pembelajar.
- c. Meningkatkan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian siswa sekolah menengah pertama yang bermoral agama, menguasai ilmu pengetahuan dan memiliki keterampilan hidup.
- d. Meningkatkan profesionalitas dan akuntabilitas Sekolah Menengah Pertama dalam menjalankan fungsinya secara maksimal, baik fungsi pendidikan, fungsi ekonomis, fungsi sosial budaya maupun fungsi politis.
- e. Memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang efektif dan efisien berdasarkan prinsip kemandirian dalam rangka otonomi daerah di bawah naungan negara kesatuan republik Indonesia.

3.4. Tujuan Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama

Program pembangunan pendidikan SMP tahun 2005 – 2009 yang berintikan penuntasan program Wajar Pendidikan Dasar 9 Tahun yang bermutu bertujuan untuk mewujudkan:

1. Meningkatkan angka prestasi kasar SMP/MTs/setara hingga mencapai minimal 95%, dengan layanan baik sesuai dengan standar pelayanan minimal.
2. Meningkatkan kesetaraan gender dalam pendidikan dasar, sehingga angka partisipasi kasar untuk siswa perempuan di SMP/MTs/setara mencapai 95%.

3. Mengupayakan layanan pendidikan dasar agar berjalan dengan baik, sehingga angka mengulang kelas di SMP/MTs/setara maksimal 0,28%, angka putus sekolah di SMP/MTs/setara minimal 97%.
4. Meningkatkan prestasi siswa secara bertahap, rasio siswa-guru diharapkan tetap pada angka 16 untuk SMP/MTs/setara seperti yang telah tercapai saat ini, rasio siswa-kelas 36, rasio kelas-ruang kelas 1, rasio laboratorium-sekolah 100%, tingkat kelayakan guru 80% dan kondisi gedung sekolah yang rusak berat maksimal 1%.
5. Meningkatkan jumlah SMP yang mencapai Standar Nasional minimal mencapai 60% dari populasi SMP.

3.5. Kebijakan Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama

Program-program Direktorat Pendidikan lanjutan Pertama kurun waktu 2005-2009 diprioritaskan pada penuntasan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun yang bermutu yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia Indonesia dengan memperhatikan tantangan-tantangan sebagaimana diuraikan pada Bab II. Program-program harus dapat menjangkau anak-anak yang tinggal di daerah terpencil, anak-anak dari keluarga kurang mampu, anak-anak di daerah konflik, daerah paska bencana, anak perempuan dan anak berkelainan.

Sehubungan dengan hal tersebut, kebijakan pembangunan pendidikan SMP Direktorat PLP dirumuskan sebagai berikut:

1. Meningkatkan akses dan perluasan kesempatan belajar bagi semua anak usia 13-15 tahun, dengan target utama daerah dan masyarakat miskin, terpencil dan terisolasi. Penekanan ini diambil karena kecenderungan bahwa anak-anak yang belum memasuki pendidikan SMP pada umumnya disebabkan oleh kondisi ekonomi

keluarga, alasan cultural dan atau bertempat tinggal di daerah terpencil atau terisolasi.

2. Upaya peningkatan akses kepada layanan pendidikan diupayakan bersamaan dengan peningkatan angka partisipasi anak perempuan, sehingga terwujud keseimbangan gender. Di daerah tertentu anak-anak perempuan masih terhambat oleh factor adat istiadat dan budaya untuk dapat menyelesaikan Pendidikan Dasar 9 Tahun, sehingga perlu upaya khusus untuk mengatasinya.
3. Wajar Dikdas 9 Tahun dilaksanakan bersama-sama dengan peningkatan mutu dan relevansi pendidikan dasar, sehingga tamatan mempunyai kompetensi dasar yang dapat digunakan untuk hidup dalam masyarakat dan atau melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah. Dengan demikian penuntasan wajib belajar tidak dapat dipisahkan dari peningkatan mutu pendidikan.
4. Meningkatkan efisiensi manajemen pendayagunaan sumberdaya pendidikan dan mengupayakan agar semua lembaga pendidikan dasar dapat melaksanakan fungsinya secara efektif dan efisien.
5. Wajar Dikdas 9 Tahun dilaksanakan melalui penggalangan partisipasi masyarakat dalam berbagai bentuk. Partisipasi masyarakat tidak hanya dalam bentuk sumbangan dana dan fasilitas, tetapi juga dalam sumbangan pemikiran, keahlian dan bentuk-bentuk lainnya. Dengan cara itu masyarakat akan terdorong untuk berpartisipasi, sehingga Wajar Dikdas 9 Tahun dapat menjadi gerakan sosial nasional.

3.6. Target Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama

Wajar Dikdas 9 Tahun merupakan amanat nasional yang sangat penting. Agar target penuntasannya dapat dicapai dengan baik pada tahun 2009, perlu ditetapkan atau

dirancang target-target yang secara bertahap direalisasikan setiap tahun. Selain itu, karena pelaksanaan Wajar melibatkan berbagai lembaga, program penuntasan Wajar harus disusun dan dilaksanakan secara terpadu dengan semua lembaga terkait.

Dengan memperhatikan profil pendidikan dasar saat ini, target-target utama yang hendak dicapai pada kurun waktu tahun 2005 sampai dengan 2009 adalah sebagai berikut:

1. Pada tahun 2009 APK penduduk usia 13-15 tahun diharapkan mencapai 98,09%, Angka Mengulang Kelas maksimal 0,32%, dan Angka Putus Sekolah juga 0,08%. Angka Kelulusan SMP/MTs ditargetkan dapat mencapai 97%. Bersamaan dengan itu Kejar Paket B dapat menampung 221.948 orang warga belajar.
2. Untuk mengupayakan agar pendidikan di SMP bermutu maka rasio siswa-guru secara nasional tetap seperti saat ini (16), tetapi distribusi guru lebih merata. Jumlah siswa dalam setiap rombongan belajar mencapai 36 orang, sedangkan rasio kelas terhadap ruang kelas 1,00 sehingga tidak ada lagi double shift. Gedung sekolah yang rusak ringan maupun yang rusak berat diharapkan maksimal 1%.
3. Pada tahun 2009, diharapkan semua SMP memiliki laboratorium dan perpustakaan, sehingga rasio laboratorium terhadap sekolah 1,00 dan rasio perpustakaan terhadap sekolah juga 1,00. Rehabilitasi gedung sekolah dapat berjalan dengan baik, sehingga pada tahun 2009, jumlah ruang kelas yang rusak berat tinggal 1%, sedangkan yang rusak ringan tinggal 1%.

3.7. Program-program Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama

Memperhatikan kebijakan dan target penuntasan Wajar Dikdas 9 Tahun yang bermutu serta masalah-masalah yang dihadapi, Direktorat Pendidikan Lanjutan Pertama

menetapkan berbagai program untuk tahun 2005-2009. Program-program tersebut dikelompokkan menjadi tiga, yaitu perluasan dan pemerataan kesempatan belajar, peningkatan mutu dan relevansi pendidikan, dan peningkatan mutu pengelolaan pendidikan. Program-program tersebut dengan singkat diuraikan sebagai berikut.

3.7.1. Perluasan Kesempatan dan Pemerataan Kesempatan Belajar

a. Pembangunan USB SMP

Pada daerah terpencil, pedesaan, terisolir, dan kantong-kantong kemiskinan kesempatan memperoleh pendidikan masih terbatas. Sekolah-sekolah yang ada belum dapat menampung atau terjangkau oleh semua anak usia pendidikan dasar. Untuk itu salah satu alternative pemecahannya adalah dengan pembangunan sekolah baru di daerah-daerah tersebut.

Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dilaksanakan di daerah-daerah yang benar-benar membutuhkan, didasarkan pada kebutuhan obyektif daerah yang bersangkutan. Oleh karena itu, pada tahapan persiapan pembangunan akan dilakukan pemetaan sekolah (*school mapping*) sehingga dapat ditetapkan lokasi USB yang tepat. Dengan begitu USB yang dibangun dapat menjawab kebutuhan perluasan pelayanan pendidikan secara efektif dan efisien. Salah satu hal yang harus diperhatikan adalah bahwa pembangunan USB ini tidak boleh menyebabkan penutupan sekolah swasta yang ada di sekitar USB tersebut.

Target pembangunan USB sampai dengan tahun 2009 adalah sebanyak 2,202 SMP di seluruh Indonesia.

b. Pembangunan RKB

Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) merupakan salah satu upaya lain dalam memperluas kesempatan belajar. Pembangunan RKB dilaksanakan dengan mekanisme subsidi kepada sekolah-sekolah baik negeri maupun swasta yang membutuhkan sesuai dengan kondisi obyektif yang bersangkutan. Pola pelaksanaan pembangunan RKB adalah dengan imbal swadaya. Jumlah Ruang Kelas Baru (RKB) yang perlu dibangun dalam rangka penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun sampai tahun 2009 adalah 35.550 ruang kelas baru.

c. Revitalisasi Fasilitas Pendidikan

1. Rehab Berat

Fasilitas belajar yang dimiliki oleh sekolah di antaranya ruang kelas, ruang penunjang, WC, dan sebagainya adalah prasarana utama terjadinya proses pembelajaran. Namun, banyak diantara ruang-ruang tersebut yang kondisinya cukup memprihatinkan karena rusak berat. Ruang yang rusak berat ini tidak dapat digunakan untuk proses pembelajaran, atau pun kalau digunakan dapat proses pembelajaran, atau pun kalau digunakan dapat membahayakan. Apabila ruang-ruang yang rusak berat tersebut tidak segera diperbaiki dan akhirnya tidak dapat dipergunakan, maka daya tampung sekolah akan turun yang mengakibatkan sempitnya kesempatan memperoleh pendidikan dan meningkatkan angka putus sekolah. Untuk itu usaha rehabilitasi gedung SMP yang rusak merupakan salah satu prioritas pemerintah sehingga siswa dapat menjalankan proses belajar dengan baik dan mengurangi kemungkinan anak putus sekolah.

Target jumlah ruang kelas yang direhab berat hingga tahun 2009 adalah 14.203 ruangan.

2. Rehab ringan

Kerusakan sekolah sekecil apa pun dapat menghambat kenyamanan, kelancaran dan optimalisasi proses pembelajaran yang pada gilirannya dapat menghambat upaya penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun yang bermutu. Kerusakan kecil ini jika tidak segera ditangani akan bias menjadi kerusakan yang parah. Rehab ringan seharusnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pemanfaatan dan perawatan sekolah. Pemerintah dalam hal ini membantu sekolah dalam melakukan rehab ringan melalui subsidi untuk rehabilitasi ringan.

Target jumlah ruang kelas yang direhab ringan hingga tahun 2009 adalah 38.085 ruangan.

d. Subsidi Siswa

Sebagai akibat dari krisis ekonomi yang berkepanjangan, pada tahun 2005 diperkirakan 17% dari rakyat Indonesia berada di bawah garis kemiskinan. Anak-anak usia pendidikan dasar dari mereka yang kurang beruntung tersebut terancam tidak dapat memperoleh layanan pendidikan karena alasan tidak memiliki biaya pendidikan. Sehubungan dengan hal tersebut, penyediaan subsidi biaya sekolah siswa mutlak dilakukan agar mereka yang telah bersekolah tidak drop out dan yang tidak dapat sekolah dapat mulai sekolahnya.

Pada tahun 2005-2009 pemerintah merencanakan memberikan beasiswa kepada lebih dari 10 juta siswa SMP agar mereka tetap dapat melanjutkan pendidikannya hingga tamat antara lain melalui program Bantuan Khusus Murid (BKM) dan

Retrieval dan menyediakan subsidi biaya masuk sekolah kepada sekitar 1,5 juta anak melalui program subsidi Transisi.

e. Pembangunan Asrama Siswa

Salah satu tantangan berat yang dihadapi oleh pemerintah dalam menuntaskan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun adalah menyediakan layanan pendidikan kepada anak-anak usia sekolah yang tempat tinggalnya terpencar-pencar dalam komunitas yang kecil-kecil. Karena jumlah calon siswa di tiap komunitas tersebut sedikit, pembangunan unit sekolah baru pada komunitas tersebut dipandang kurang efisien. Strategi yang dinilai efisien adalah pembangunan anak-anak tersebut ke suatu sekolah berasrama. Sehubungan dengan hal tersebut, pada kurun waktu 2005-2009 pemerintah menargetkan membangun 5.400 unit asrama siswa/guru pada sekolah-sekolah yang menampung anak-anak dari daerah yang terpencil, terpencar-pencar, dan terisolasi.

f. SD-SMP Satu Atap (Pendidikan Dasar Terpadu)

Menjawab tantangan kondisi pada daerah-daerah terpencil dan terisolir yang belum terjangkau oleh layanan pendidikan dengan jumlah penduduk yang tidak terlalu besar, di daerah tersebut akan dikembangkan SMP Kecil yang satu atap dengan SD. Sejumlah SD di daerah-daerah terpencil akan dikembangkan menjadi SD-SMP Satu Atap dengan penambahan ruang kelas, ruang penunjang pembelajaran, guru, tenaga administrasi, serta sarana/prasarana lainnya. Selain menampung lulusan SD yang dikembangkan menjadi SD-SMP Satu Atap, SD-SMP Satu Atap tersebut dapat menampung lulusan SD-SD disekitarnya.

Target SD-SMP Satu Atap yang dikembangkan sampai dengan 2009 berjumlah 4.025 sekolah.

Selain program-program tersebut, pelayanan pendidikan melalui SMP Terbuka akan dilanjutkan dengan penyediaan biaya operasional SMP Terbuka, pembukaan TKB Mandiri, beasiswa bagi siswa SMP Terbuka, serta pemberian subsidi penyelenggaraan PKH dengan orientasi pada kecakapan pra-vokasional pada SMP Terbuka. Di samping itu, menyadari besarnya peranan sekolah swasta sebagai mitra pemerintah dalam menyediakan layanan pendidikan, untuk mendukung kelangsungan sekolah-sekolah swasta dalam menyelenggarakan pendidikan yang bermutu, pemerintah akan meneruskan menyediakan berbagai macam subsidi. Selanjutnya upaya peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan akan diteruskan dengan berbagai macam penyuluhan atau kampanye pendidikan, dan untuk lebih mendorong pemerintah daerah dan berbagai elemen dalam masyarakat dalam menuntaskan wajib belajar pendidikan dasar, berbagai macam penghargaan akan dianugerahkan kepada pihak-pihak yang telah melaksanakan program penuntasan wajib belajar dengan baik.

3.7.2. Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan

Mutu pendidikan dasar masih rendah ditinjau dari segi produk maupun proses. Dari sisi produk, rerata NUAN secara nasional belum menggembirakan. Selain itu, penguasaan materi oleh siswa lebih bersifat pada *declarative knowledge*, kurang dalam hal *procedural knowledge*. Selain itu aspek-aspek ketrampilan personal, social, akademik dan (pra) vokasional masih kurang.

Dari segi proses, walau telah diupayakan berbagai upaya melalui berbagai program, sangat disadari bahwa mutu proses pembelajaran masih cukup jauh dari ideal. Metode ceramah masih mendominasi proses pembelajaran. Metode-metode yang

memacu siswa mengembangkan sikap-sikap kritis, kreatif, inovatif, disiplin, kerja keras, jujur, rajin, dan demokratis serta yang menumbuhkan kecakapan personal, social, akademik, dan (pra) vokasional masih sangat sedikit digunakan. Proses pembelajaran masih cenderung mengarah pada pemerolehan declarative knowledge.

Untuk meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan, Direktorat Pendidikan Lanjutan Pertama menetapkan sejumlah program yang dikelompokkan menjadi empat.

a. Pengembangan Mutu Sekolah

Mutu sekolah perlu terus dikembangkan menuju sekolah yang dapat menyediakan layanan pendidikan setidaknya-tidaknya memenuhi standar pelayanan minimal. Agar pemerintah dapat memberikan perlakuan atau fasilitasi yang tepat, jenis dan jumlah bantuan yang diberikan kepada sekolah untuk meningkatkan mutunya disesuaikan dengan kondisi sekolah itu sendiri.

Hingga tahun 2009, pemerintah menargetkan memberikan subsidi pengembangan mutu pendidikan sebanyak 63.000 paket kepada SMP Rintisan dan Potensial, 9.729 paket kepada SMP Standar Nasional, dan 729 paket kepada Sekolah Koalisi, serta 9.816 paket untuk pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup di SMP.

b. Kegiatan Kesiswaan

Kegiatan kesiswaan merupakan kegiatan yang sangat penting dalam rangka mengembangkan kecakapan akademik dan non-akademik. Melalui berbagai kesiswaan, siswa dapat mengembangkan dirinya sebagai pribadi yang utuh. Untuk menunjang kegiatan kesiswaan, pemerintah menargetkan memberikan lebih dari 110.000 paket bantuan untuk kurun waktu 2005-2009. Bantuan ini akan dapat menjangkau hampir semua SMP di seluruh Indonesia.

c. Sarana dan Prasarana Pendidikan

Sarana dan Prasarana pendidikan seperti buku pelajaran, perpustakaan, laboratorium IPA, laboratorium bahasa, laboratorium komputer, dan ruang keterampilan mutlak dipenuhi apabila mutu pembelajaran dan lulusan ingin diwujudkan. Sehubungan dengan hal tersebut, pada tahun 2005-2009 pemerintah melalui Direktorat PLP menargetkan menyediakan buku pelajaran SMP kurang lebih 66 juta eksemplar yang terbagi dalam berbagai mata pelajaran, membangun 8.500 perpustakaan, 6.000 laboratorium IPA, 7.200 laboratorium bahasa dan ruang serbaguna, 3.760 laboratorium komputer, dan kurang lebih 5.800 ruang keterampilan.

d. Rehabilitasi dan Revitalisasi Laboratorium

Agar pendidikan dapat berfungsi dengan baik dalam mendukung terciptanya pembelajaran yang berkualitas, prasarana tersebut perlu dipelihara dan direvitalisasi. Untuk itu pada tahun 2005-2009 Direktorat PLP merencanakan melakukan rehabilitasi dan revitalisasi terhadap laboratorium IPA, bahasa, laboratorium komputer.

Selain program-program tersebut, Direktorat PLP akan terus mengembangkan program *bilingual* (MIPA berbahasa Inggris), *Bridging Course*, Pendidikan Teknologi Dasar, remedial, Pelatihan Terintegrasi Berbasis Kompetensi (PTBK), MGMP, pengembangan model-model pembelajaran (misalnya CTL), pelatihan pengawas dan kepala sekolah, serta program-program peningkatan mutu pendidikan dengan dana pinjaman luar negeri seperti *Basic Education Project* (BEP) dan *Decentralized Basic Education Project* (DBEP).

3.7.3. Peningkatan Sistem Pengelolaan Pendidikan

a. Sistem Informasi Manajemen (melalui koordinasi pusat dan Dekonsentrasi)

Pengembangan pendidikan melalui berbagai macam program baik ditingkat pusat, propinsi, maupun daerah akan sangat rasional, proporsional, dan akurat jika didukung oleh data yang akurat dan lengkap. Untuk itu data yang lengkap merupakan satu keharusan. Oleh karena itu upaya pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan (SIMP) perlu lebih diintensifkan sehingga menjadi lebih lengkap, akurat dan mutakhir. Data di setiap tingkat manajemen pendidikan mulai dari tingkat pusat, propinsi, kabupaten/kota, kancam dinas, maupun sekolah harus ada secara lengkap, akurat dan mutakhir. Kelengkapan, keakuratan, dan kemutakhiran data sangat penting di setiap tingkatan manajemen dalam mengambil keputusan dengan baik dan benar.

b. *Capacity Building*

Kemampuan mengelola dan mengembangkan pendidikan baik tingkat propinsi, Kabupaten/Kota maupun sekolah masih perlu ditingkatkan melalui berbagai upaya pengembangan kapasitas pengelola pendidikan. Di tingkat Kabupaten/Kota Kepala Dinas Pendidikan dan jajarannya beserta Dewan Pendidikan perlu ditingkatkan pemahamannya akan tugas pokok dan fungsi mereka serta berbagai macam strategi perluasan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu pendidikan, dan peningkatan relevansi, dan efisiensi pendidikan. Di tingkat sekolah, Kepala Sekolah, guru, staf administrasi dan Komite Sekolah perlu ditingkatkan kemampuan mereka dalam mengelola sekolah menuju sekolah yang berkualitas. Dewan Pendidikan di tingkat kabupaten/kota dan Komite Sekolah di tingkat SMP/MTs perlu terus diberdayakan sehingga mampu menjalankan fungsinya sebagai pemberi pertimbangan kebijakan

pendidikan/sekolah, pemberi dukungan pelaksanaan dan manajemen pendidikan/sekolah, pengawas dan penilai kinerja pendidikan/sekolah, serta mediator antara pengelola/penyelenggara satuan pendidikan dengan masyarakat baik orangtua siswa, masyarakat peduli pendidikan, maupun dunia usaha dan industri.

c. Standarisasi dan Akreditasi Sekolah

Rentang mutu pendidikan di Indonesia pada jenjang SM cukup lebar. Yang cukup memprihatinkan adalah bahwa sebagian besar SMP masih dibawah standar nasional, dan jumlah SMP yang mutunya baik masih sedikit. Untuk meningkatkan kualitas sekolah dalam berbagai aspek perlu dilakukan standarisasi sekolah, dan untuk melihat seberapa jauh sekolah telah memenuhi standar tersebut perlu dilakukan akreditasi sekolah. Berdasarkan hasil akreditasi sekolah dapat mengembangkan sekolahnya lebih jauh, terutama aspek-aspek yang dinilai masih kurang/belum berkembang. Selain itu Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dapat menentukan jenis pembinaan yang harus diberikan kepada sekolah yang bersangkutan.

Standarisasi dan akreditasi sekolah merupakan bagian dari upaya peningkatan kualitas sekolah sehingga sekolah yang pelayanannya dibawah minimum dapat diketahui keberadaannya untuk segera dapat ditangani dengan baik, benar, cepat, dan tepat.

d. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi bertujuan untuk memastikan bahwa program atau kegiatan yang telah dirancang dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah diprogramkan dan untuk mengetahui kendala-kendala selama proses pelaksanaannya. Monitoring merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memantau

atau mengawasi proses pelaksanaan suatu kegiatan, mengetahui perkembangan pelaksanaannya, dan mengidentifikasi kendala atau masalah di lapangan untuk dicari alternative pemecahannya. Evaluasi merupakan upaya mengumpulkan, menganalisis, serta menginterpretasi data/informasi dari pelaksanaan suatu program untuk mengetahui tingkat pencapaian suatu program berdasarkan criteria yang telah ditentukan. Sementara kegiatan monitoring dilakukan pada saat pelaksanaan program berlangsung, evaluasi dilakukan pada akhir pelaksanaan program.

Monitoring dan evaluasi merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dari setiap program. Pelaksanaannya dilakukan secara sistematis sehingga hasil dan kesimpulannya mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Dengan demikian setiap kendala dapat dipecahkan dan rekomendasi tindak lanjut program dapat dirumuskan secara tepat.

e. Koordinasi

Berbagai program pembangunan pendidikan yang dilaksanakan oleh Direktorat Pendidikan Lanjutan Pertama ditujukan pada tiga hal utama, yaitu perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, peningkatan mutu dan relevansi pendidikan, dan peningkatan kualitas manajemen pengelolaan pendidikan. Pemerintah daerah, melalui dana APBD, baik APBD-1 maupun APBD-2 juga mengembangkan berbagai program pendidikan. Untuk itu, agar program yang dikembangkan oleh pusat dipahami oleh propinsi dan kabupaten kota maka perlu dilakukan sosialisasi program. Agar program pembangunan pendidikan yang dilakukan dengan dana daerah tidak tumpang tindih dengan program dari pusat, maka perlu dilakukan koordinasi dan sinkronisasi program antara pemerintah

pusat, propinsi, dan kabupaten/kota. Selain itu agar program yang dikembangkan dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan standar yang ditetapkan, maka dalam pelaksanaan implementasi tersebut perlu dilakukan pembinaan teknis baik melalui jalur koordinasi, birokrasi maupun konsultasi.

3.8. Strategi Pelaksanaan pada Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama

Untuk melaksanakan program-program tersebut diatas, strategi pelaksanaan ditetapkan sebagai berikut:

1. Meningkatkan dan memperkuat program-program esensial yang telah ada untuk meningkatkan jumlah siswa masuk sekolah (enrollment). Program-program yang kurang esensial dikaji ulang dan sumberdaya yang ada dimobilisasi untuk mendukung program penuntasan wajib belajar.
2. Pendekatan budaya akan diterapkan untuk mendukung upaya penyadaran tentang pentingnya pendidikan, khususnya untuk daerah-daerah tertentu dan untuk anak perempuan.
3. Melakukan pengembangan inovasi dalam pendekatan pembelajaran dan manajemen agar program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun tuntas pada tahun 2009 dengan mutu yang memadai.
4. Penerapan pelaksanaan pendidikan alternative (misalnya Sekolah Kecil, SMP Terbuka, Paket A dan Paket B) dan SD-SMP Satu Atap (Pendidikan Dasar Terpadu) untuk menjangkau anak-anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil, anak-anak dari masyarakat dengan karakteristik khusus, seperti Suku Bajo dan Suku Kubu.

5. Peningkatan kerjasama yang sinergis antara berbagai lembaga pendidikan yang menangani pendidikan setingkat pendidikan dasar untuk mempercepat program penuntasan wajib belajar.
6. Seiring dengan era desentralisasi pendidikan, maka kegiatan operasional pendidikan berada pada Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, kerjasama yang baik antara pemerintah pusat, propinsi dan kabupaten/kota terus diperkuat sehingga pelaksanaan program-program sinergis.
7. Menyadari bahwa kemampuan daerah yang sangat bervariasi, perlu dicari pola kerjasama yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah propinsi dengan kabupaten/kota. Untuk kabupaten/kota yang “kaya” peran pemerintah akan lebih banyak sebagai fasilitator yang memberikan bantuan teknis, sedangkan untuk daerah yang “kurang mampu”, peran pemerintah akan memberikan bantuan teknis dan anggaran. Indikator kemampuan anggaran daerah akan dicermati berdasarkan APBD dan PAD.
8. Bersamaan dengan peningkatan akses, mutu pendidikan juga ditingkatkan agar semua warga negara memperoleh pendidikan dasar yang bermutu. Tiga kategori capaian pendidikan yang dijelaskan, pada bagian kondisi saat ini (akses tinggi-mutu tinggi, akses tinggi-mutu rendah, akses rendah-mutu rendah memerlukan treatment yang berbeda. Untuk daerah yang capaian akses tinggi-mutu tinggi, program Wajar difokuskan untuk memperkuat program-program yang sudah ada dan melanjutkan upaya peningkatan mutu. Untuk daerah dengan capaian akses tinggi-mutu rendah, program Wajar difokuskan untuk peningkatan mutu. Untuk daerah dengan capaian akses rendah-mutu rendah, program Wajar 9 tahun difokuskan untuk meningkatkan akses tanpa melupakan upaya peningkatan mutu. Selain itu, perlu diupayakan

manajemen penyelenggaraan pendidikan yang efektif dan efisien dengan didukung oleh system informasi yang handal.

9. Memberikan peluang yang lebih besar kepada sekolah-sekolah swasta dan lembaga pendidikan yang berbasis masyarakat untuk lebih berpartisipasi dalam pelaksanaan pendidikan dasar. Strategi ini dimaksudkan menggalang partisipasi masyarakat luas dalam penuntasan Wajar 9 tahun.
10. Menggalang partisipasi semua kekuatan masyarakat, seperti orang tua, tokoh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dunia industry, dan usahawan, sehingga pelaksanaan penuntasan Wajar Dikdas 9 Tahun betul-betul merupakan gerakan masyarakat secara nasional.

